

# RENCANA KERJA (RENJA)

---

TAHUN 2025

---

DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK



DINAS SOSIAL KOTA  
PONTIANAK

*Empati*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, 14 Agustus 2024

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	II-36
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-I

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	.....	II-3
TABEL 2.2	.....	II-27
TABEL PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SESUAI TUPOKSI DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK.....		II-40
TABEL 2.3	.....	II-46
TABEL 2.4	.....	II-61
TABEL 3.1	.....	III-8
TABEL 3.2	.....	III-21
TABEL 4.1	.....	IV-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di

- Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
  18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
  19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
  20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
  21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
  22. Peraturan Daerah Nomor            Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor            , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor            ).
  23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak**

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan. Untuk itu, pengisian Tabel TC. 29 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) dan target pada tahun berjalan (2024).

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan evaluasi.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI (Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Integrasi) diwujudkan dengan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- b. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban.
- c. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat
- d. Melayani sepenuh hati tanpa pamrih.
- e. Bekerja profesional sesuai dengan peraturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2022 (N-3) dan perkiraan capaian pada tahun 2025 (Tahun Berjalan), dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

**TABEL II.1 (T-C.29).**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA**  
**PONTIANAK DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**  
**SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN				
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretaritan	95	Persen		Persen		Persen		Persen	95	Persen	95	Persen	100%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		Persem		Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	33%
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	33%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		8	Laporan	8	Laporan	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		5	Laporan	5	Laporan	33%
1.6.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.6.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	Orang		Bulan		bulan		bulan		27	Orang	27	Orang	33%
1.6.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.6.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	54	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		18	Laporan	18	Laporan	33%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	33%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	210	Paket		Paket		Paket		Paket		70	Paket	70	Paket	33%
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	15	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang	5	Orang	33%
1.06.01.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket	12	Paket	33%
1.06.01.2.6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket	12	Paket	33%
1.06.01.2.6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket	12	Paket	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.01.2.6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	33%
1.06.01.2.6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		34	Laporan	34	Laporan	33%
1.06.01.2.6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	33%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	39	Unit		Unit		Unit		Unit		13	Unit	13	Unit	33%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		2	Laporan	2	Laporan	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	Unit		Unit		Unit		Unit		9	Unit	9	Unit	100%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	Unit		Unit		Unit		Unit		100	Unit	100	Unit	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	1	Unit	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	3	Unit		Unit		Unit		Unit	1	Unit	1	Unit	33%	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL</b>	<b>Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100%	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	60	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	33%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekersja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Orang		Orang		Orang		Orang		20	Orang	20	Orang	33%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	126	Orang		Orang		Orang		Orang		42	Orang	42	Orang	33%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	111	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		27	Keluarga	27	Keluarga	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	21	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		7	Lembaga	7	Lembaga	33%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat		20	Sertifikat	20	Sertifikat	33%
1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN					
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Desa/ Kelurahan asal	100	Persen		Persen	100	Persen		Persen		100	Persen	100	Persentase	100%
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang	5	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	23.385	Orang		Orang		Orang		Orang		7795	Orang	7795	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	900	Orang		Orang		Orang		Orang		300	Orang	300	Orang	33%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang	5	Orang	33%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang	40	Orang	33%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang	50	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang		Orang		Orang		100	Orang	100	Orang	33%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	120	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang	40	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0008	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/ Kota	180	Orang		Orang		Orang		Orang		60	Orang	60	Orang	33%
1.06.04.2.01.0009	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	600	Orang		Orang		Orang		Orang		200	Orang	200	Orang	33%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/ Kota	30	Orang		Orang		Orang		Orang		10	Orang	10	Orang	33%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang	40	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH ) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)			11=(10/4)		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	240	Orang		Orang		Orang		Orang		80	Orang	80	Orang	33%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	900	Orang		Orang		Orang		Orang		300	Orang	300	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang	50	Orang	33%
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase penerima bantuan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang didata	120.000	Orang		Orang		Orang		Orang		40.000	Orang	40.000	Orang	33%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	60.000	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		20.000	Keluarga	20.000	Keluarga	33%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		10.000	Keluarga	10.000	Keluarga	33%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang		Orang		Orang		100	Orang	100	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Pesen	100	Persen	100%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	1050	Orang		Orang		Orang		Orang		350	Orang	350	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN				
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	600	Orang		Orang		Orang		Orang		200	Orang	200	Orang	33%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Unit		Unit		Unit		Unit		100	Unit	100	Unit	33%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang	40	Orang	33%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota	36	Orang		Orang		Orang		Orang		12	Orang	12	Orang	33%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	100	Persen	100%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang	50	Orang	33%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 bahwa sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2022, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 1.393.286.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.096.930.165,00 atau 78,73%. Pada tahun 2023 alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 13.033.455.052,00 telah terealisasi sebesar Rp. 12.179.345.662,00 atau 93,45%.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan targetnya untuk perencanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2024 terdapat 27 orang ASN yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak. Pada tahun 2025 jumlah ASN bertambah menjadi 34 orang ASN yang terdiri dari 28 orang PNS dan 6 Orang PPPK.
- b. Pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 9 unit. Dengan adanya hibah kendaraan dari Sekretariat Kota Pontianak dan hibah dari Kementerian Sosial, target bertambah menjadi 12 Unit.
- c. Pada subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 27 orang yang mendapatkan peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat. Pada tahun 2025 berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penambahan anggaran pada subkegiatan tersebut, ada penambahan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kapasitasnya menjadi 50 orang.
- d. Pada subkegiatan Penyediaan Alat Bantu pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 5 orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan. Pada tahun 2025 berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penambahan anggaran pada subkegiatan tersebut, ada penambahan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kapasitasnya menjadi 50 orang.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/ Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/ indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra 2024-2026.

TABEL II.2 (T-C. 30.)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial <u>Indikator</u> : Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial <u>Indikator</u> : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				100%	100%	100%	100%		100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar <u>Indikator</u> : Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu				100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	✓	✓		100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		✓		200 Pengaduan	200 Pengaduan	200 Pengaduan	340 Pengaduan		350 Pengaduan	350 Pengaduan	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		✓		-	-	-	-		-	-	Orang terlantar mayoritas tidak memiliki kartu identitas sehingga sulit untuk diidentifikasi. Jika sudah dilakukan penelusuran dan/ atau reunifikasi, baru dapat diidentifikasi apakah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut dapat diusulkan didaftarkan pada DTKS
	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		✓		2 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim		2 Tim	2 Tim	Tim Reaksi Cepat yang dibentuk di Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu : 1. Tim SLRT B'Desut 2. Tim Taruna Siaga Bencana
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gepeng yang dijangkau		✓		-	-	-	463 Orang		460 Orang	460 Orang	
	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		✓		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	Kendaraan kedaruratan yang disediakan terdiri dari : 1. Ambulance 2. Mobil Operasional 3. Mobil RTU ( <i>Rescue Tactical Unit</i> )

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		✓		7795 Orang	7795 Orang	7795 Orang	6882 Orang		7795 Orang	7795 Orang	Jumlah tersebut didapat dari jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 (tiga) kali sehari selama satu tahun
	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		✓		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	Rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu : 1. Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) 2. PLAT
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		✓		300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang		300 Orang	300 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		✓		5 Orang	5 Orang	5 Orang	76 Orang		5 Orang	5 Orang	Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Pontianak mendapatkan anggaran insentif fiskal untuk penyediaan alat bantu sehingga capaian pada tahun 2023 sangat tinggi

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		✓		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	
	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		✓		11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket		11 Paket	11 Paket	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		✓		11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang		11 Orang	11 Orang	
	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		✓		2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang		2 Orang	2 Orang	
	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		✓		37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang		37 Orang	37 Orang	Pekerja Sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu : 1. 31 Orang Pekerja Sosial Kemensos 2. 6 Orang TKSK di Kecamatan

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		✓		100 Orang	100 Orang	100 Orang	121 Orang		100 Orang	100 Orang	
	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		✓		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		✓		40 Orang	40 Orang	40 Orang	32 Orang		40 Orang	40 Orang	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		✓		60 Orang	60 Orang	60 Orang	66 Orang		60 Orang	60 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		✓		40 Orang	40 Orang	40 Orang	53 Orang		50 Orang	50 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		✓		40 Orang	40 Orang	40 Orang	69 Orang		60 Orang	60 Orang	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		✓		80 Orang	80 Orang	80 Orang	162 Orang		100 Orang	115 Orang	
2.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	✓	✓		100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		✓		350 Orang	350 Orang	350 Orang	356 Orang		350 Orang	350 Orang	
	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		✓		200 Orang	200 Orang	200 Orang	134 Orang		200 Orang	200 Orang	
	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		✓		100 Unit	100 Unit	100 Unit	126 Unit		100 Unit	100 Unit	Indikator ini realisasinya berbentuk penyerahan barang kepada korban bencana berupa terpal

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		✓		4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok	Kelompok yang menjadi sasaran penanganan khusus adalah : 1. Kelompok Lansia 2. Kelompok Ibu yang sedang mengandung dan menyusui 3. Kelompok bayi dan balita 4. Kelompok disabilitas
	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		✓		12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang		12 Orang	12 Orang	Target pelaksanaan layanan dukungan psikososial sesuai dengan jumlah korban bencana yang terdampak
	Jumlah pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		✓		62 Orang	62 Orang	62 Orang	62 Orang		62 Orang	62 Orang	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dan masyarakat dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

- A. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan.

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial. Setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Dinas Sosial Kota Pontianak dalam hal pelayanan adalah :

### 1. Kemiskinan

- a. Kurangnya lapangan pekerjaan.
- b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah.
- c. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak membutuhkan tenaga fisik atau masih kurangnya lapangan pekerjaan.
- d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.
- e. Penerima bantuan sosial masih belum tepat sasaran.

Pengaruh dari isu tersebut dapat berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan angka putus sekolah.

### 2. Anak Terlantar

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak dapat terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis menjadi pilihan pemenuhan biaya untuk kebutuhan dasar.
- b. Masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan anak terlantar.
- c. Perlu penanganan secara intensif dai Perangkat Daerah terkait termasuk daerah Provinsi.
- d. Penanganan orang terlantar belum maksimal.

Pengaruh dari isu tersebut adalah citra Kota Pontianak menjadi buruk karena penanganan gelandangan dan anak terlantar tidak pernah selesai.

### 3. Penyandang Disabilitas

- a. Perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
- b. Perlu adanya peningkatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas sehingga masih memerlukan bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
- c. Memfasilitasi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pengaruh dari isu tersebut adalah masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.

### 4. Lanjut Usia Terlantar

- a. Perlu adanya rencana aksi atau *roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia.

- b. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar.
- c. Perlu kerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar.

Pengaruh dari isu tersebut adalah kebutuhan pokok hidup untuk memenuhi pelayanan sosial lanjut usia belum terjamin.

**B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak**

Berdasarkan Perda tersebut, maka keluarlah peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun peraturan dimaksud dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**1. Tugas Pokok**

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

**2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Adminstrasi Dinas Sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Secara umum isu-isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah yang berdasarkan kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 yaitu dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
  2. Komitmen yang tinggi dari Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pontianak.
  3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
  4. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
- C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/ internasional.

Bank Dunia dalam laporannya berjudul *Indonesia Poverty Assessment : Pathways Towards Economic Security* yang dirilis pada awal bulan Mei 2023 menyebutkan bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dimana kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 sebanyak 1,5% dari jumlah penduduk. Meskipun angka ini sedikit berbeda dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 yakni 2,04% tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami kemajuan dari angka 2,14% di tahun 2021.

Untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2024, Presiden Republik Indonesia meminta seluruh pihak terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dibuat formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

**Permasalahan dan Isu Strategis sesuai Tupoksi Dinas Sosial Kota Pontianak**

<b>No.</b>	<b>Rumpun Masalah</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Masalah Pembangunan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Isu Daerah</b>	<b>Isu Internasional</b>	<b>Isu Nasional</b>	<b>Isu Regional</b>	<b>Isu Strategis</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial Kota Pontianak	1.Tingkat kemiskinan, 2.Akses perlindungan sosial pada masyarakat masih belum merata	3. Terbatasnya lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha 4. Kualitas dan produktivitas SDM rendah 5. Data warga miskin belum dimutakhirkan secara sistematis	1. Indeks Gini 2. Kemiskinan	1. Tingginya urbanisasi global menyebabkan meningkatnya persaingan untuk lowongan kerja di perkotaan 2. Jumlah lapangan kerja yang terbatas dapat membuat seseorang menjadi pengangguran	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM melalui pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dengan penguatan program kesejahteraan sosial masyarakat melalui KIP, KIS serta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi PPKS untuk membentuk manusia produktif 2. Penguatan program bagi PPKS dengan verifikasi dan validasi data yang akurat	1. Penanganan masalah kemiskinan di Daerah 2. Migrasi penduduk semakin meningkat 3. Rendahnya cakupan pelayanan bagi penyandang disabilitas	1. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi PPKS 2. Data warga miskin yang sistematis melalui verifikasi dan validasi update data PPKS

Adapun gambaran pencapaian visi dan misi Daerah terhadap capaian program nasional adalah sebagai berikut :

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN			SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN								
		URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2024	2025			2026	SATUAN	2024	2025	2026				
Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	Menurunnya Kemiskinan	-Tingkat Kemiskinan -Rasio Gini	%  Ratio	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100				
										Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					%	100	100	100
										Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu								

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b><u>Strengths (S)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial.</li> <li>• Peningkatan komitmen pelayanan.</li> <li>• Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan.</li> <li>• Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.</li> <li>• Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS.</li> <li>• Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan.</li> <li>• Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Weakness (W)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial.</li> <li>• Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>• Daftar DTKS belum valid dan update.</li> <li>• Keterbatasan anggaran.</li> <li>• Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Opportunities (O)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja.</li> <li>• Produk hukum yang memadai.</li> <li>• Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan.</li> <li>• Dukungan dari pekerja sosial.</li> <li>• Dukungan instansi vertikal.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Threads (T)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap.</li> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial.</li> <li>• Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>• PMKS yang sulit diatur.</li> <li>• Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan maksimal</li> </ul>

E. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka Kemiskinan	Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya lapangan pekerjaan</li> <li>b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah</li> <li>c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial</li> <li>d. Kementerian Sosial tidak menyampaikan DTKS yang update secara lengkap</li> </ul>
		Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis</li> <li>b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Anak Terlantar</li> </ul>
		Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minim akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas</li> </ul>
		Lanjut Usia Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar</li> </ul>

Dalam hal penyelesaian isu-isu penting diatas perlu untuk dilakukan evaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan verifikasi serta validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkala sehingga program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai ketentuan.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan Bappeda. Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

**TABEL II.3 (T-C. 31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KOTA PONTIANAK**

**DINAS SOSIAL**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	1.562.465.700,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	1.593.066.500,00	
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000,00	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	20 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	20 dokumen	20.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	1.473.066.500,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	1.573.066.500,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	492.465.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	592.465.700	Tedapat penambahan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	42 Orang	410.600.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	42 Orang	410.600.800	
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Keluarga	400.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	49 Keluarga	400.000.000	Penambahan jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kapasitas Pelatihan satpam : 25 Keluarga, Pelatihan menjahit : 24 Keluarga
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	120.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Lembaga	120.000.000	Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga dibawah pengawasan Dinas Sosial Kota Pontianak
	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Pontianak	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Sertifikat	50.000.000	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Pontianak	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Sertifikat	50.000.000	
2	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000</b>	
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal</b>	<b>100%</b>	<b>2.480.000</b>	

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	2.480.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	2.480.000
--	----------------	--	---------	-----------	--	----------------	--	---------	-----------

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1.009.273.400,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1.409.273.400,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	851.118.200,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	1.051.118.200,00	
	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Koita	7795 orang	475.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Koita	7795 orang	475.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	120.960.200	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	120.960.200	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	58.710.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	258.710.000	Penambahan jumlah disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan alat bantu
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	4.980.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	4.980.000	Penambahan target pelayanan reunifikasi keluarga berdasarkan evaluasi

											capaian tahun sebelumnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20.412.800	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	20.412.800	Penambahan target berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48.575.200	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	48.575.200	Penambahan target berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40 orang	4.980.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40 orang	4.980.000	
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	61.580.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	300 orang	61.580.000	Penambahan target berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	40 orang	3.980.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	50 orang	3.980.000	Penambahan target berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	4.980.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	100 orang	4.980.000	Penambahan target berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti</b>	<b>100%</b>	<b>158.155.200</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti</b>	<b>100%</b>	<b>158.155.200</b>	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	
3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</b>	<b>100%</b>	<b>3.023.935.100,00</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</b>	<b>100%</b>	<b>3.023.935.100,00</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui</b>	<b>100%</b>	<b>3.023.935.100,00</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui</b>	<b>100%</b>	<b>3.023.935.100,00</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	450.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	450.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	20.000 keluarga	34.980.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	20.000 keluarga	34.980.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 keluarga	2.512.955.100	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 keluarga	2.850.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	26.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	300.000.000	
4	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>410.680.600,00</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>410.680.600,00</b>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	382.450.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	382.450.000,00	
	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	20.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	20.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	31.135.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	31.135.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	30.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	30.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>28.230.600</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>28.230.600</b>	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektarian	95%	7.774.521.400,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektarian	100%	8.445.990.500,00	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Pontianak	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>60.394.400,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Pontianak	<b>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>60.394.400,00</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	13.394.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	13.394.400	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Pontianak	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.733.227.000,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Pontianak	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.415.741.000,00</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang/bulan	4.442.907.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.125.421.000	Penambahan jumlah ASN, 28 orang PNS dan 6 orang PPPK
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.145.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.145.000</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1.145.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1.145.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>62.620.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>62.620.000</b>	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	42.620.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	62.620.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>510.247.550,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>387.521.500,00</b>	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	29.839.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	18.000.000	
	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	90.011.500	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	90.011.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	80.886.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	70.000.000	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 laporan	150.000.000	Efisiensi anggar
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	52.010.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	52.010.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>338.613.172,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Pontianak</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	338.613.172	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.298.144.278	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.333.144.278,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.045.078	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.045.078	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.021.099.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.021.099.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	770.130.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	935.424.322,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	159.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	227.400.000	Penambahan jumlah kendaraan dinas dari hibah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	597.014.322	Peruntukan anggaran untuk rehabilitasi Gedung kanor Dinas Sosial dan Rehabilitasi Gedung UPRS karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan
<b>JUMLAH</b>					<b>13.713.957.000</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>15.496.471.000,00</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak untuk usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat.

Tabel II.4 (T-C.32.)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Pontianak			
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak			
1	Pelatihan Satpam Bagi Keluarga Tidak Mampu	Gg. Mengkudu, RT. 003/ RW. 002 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
2		Gg. mangga 1, RT. 004/ RW. 013 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
3		Lingkungan RW. 20 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
4		Gg. blitar dalam, RT. 004/ RW. 004 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
5		Lingkungan RW. 012 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
6		RT. 008/ RW. 012 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
7		Lingkungan RW. 015 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
8		RT. 001/ RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
9		RT. 002/ RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
10		RT. 003/ RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
11		RT. 007/ RW. 017 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
12		RT. 010/ RW. 017 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir

13		Jl. Aliyang No. 1b Kelurahan Sungaiangkong RW. 008/ RT 001	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	Tidak Diakomodir
14		Gg Alpokat Indah RW 17 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Tidak Diakomodir
15		RT 03/ RW 27 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Tidak Diakomodir
16		RW 03 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Tidak Diakomodir
17		RW 08 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Tidak Diakomodir
18		RW 01 sampai RW 010 Kel. Tanjung Hilir Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	Tidak Diakomodir
19		RT. 04 RW. 07 Kel. Tambelan Sampit Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Tidak Diakomodir
20		Jalan Rajawali Aula Kantor Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
21		Jl. Selat Sumba RT.005/RW.019 Kel. Siantan Tengah Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
22		Rw.012 Kel. Tanjung Hulu Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Tidak Diakomodir
23		Kelurahan Sungaijawi, Gg. Kodrat RT.004/RW.015 Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Tidak Diakomodir
24		Jalan Tanjungpura Gang Irian No 2, RT 004 RW 003 Kel. Benua Melayu Laut Pontianak Selatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Tidak Diakomodir
25		Gg. Mendawai I Jl. Imam Bonjol RT.02 RW.4 Kel. Bansir Laut Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan		Diakomodir
26		RT 002 RW 007 Kel. Bansir Darat Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Tidak Diakomodir
27		Kel. Kota Baru Pontianak Selatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Diakomodir

28		Seluruh RT/RW di wilayah Kelurahan Sungaijawi Dalam Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
29		RW 22, RW 11, RW 24, RW 06, RW 18 Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Tidak Diakomodir
30		Kelurahan Saigon Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Tidak Diakomodir
31		Kelurahan Dalam Bugis Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
32		Jalan Berdikari Nipah Kuning Dalam Rt 03 Rw 08 Kel. Pal Lima Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
33	Pelatihan Menjahit Bagi Keluarga Tidak Mampu	Gg. mangga 1, RT. 004/RW. 013 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
34		Gg. Kayu Manis 1, RT. 005/RW. 018 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
35		Rt. 03 Rw 04 Jl. Tanggul Kel. Pal Lima Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
36		Gg. Jarak, RT. 005/RW. 006 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
37		Lingkungan RW. 015 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
38		RT. 001/RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
39		RT. 002/RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
40		RT. 003/RW. 025 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
41		Gg. Kuini 1 Dalam, RT. 010/RW. 017 Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
42		Jalan Karet Gg. Angin Timur Rt 02 Rw 12 Kel. Pal Lima Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir

43		Jalan Berdikari Nipah Kuning Dalam Rt 03 Rw 08 Kel. Pal Lima Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
44		Jl. Aliyang No. 1b Kelurahan Sungaibangkong Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	109 Orang	Tidak Diakomodir
45		RW 08 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Tidak Diakomodir
46		RW 03 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Tidak Diakomodir
47		RT. 04 RW. 06 Kel. Tambelan Sampit Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
48		Jalan Rajawali Aula Kantor Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Tidak Diakomodir
49		Jl. Selat Sumba RT.005/RW.019 Kel. Siantan Tengah Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
50		Kelurahan Sungaijawi, Gg. Kodrat RT.004/RW.015 Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Tidak Diakomodir
51		Kelurahan Sungaijawi, Jalan Dr. Wahidin S. Komplek Batara Indah I Blok T RT.002/RW.030 Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Tidak Diakomodir
52		RW. 01 Sampai RW. 08 Kel. Parit Mayor Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Tidak Diakomodir
53		Jl. Kampung Arab RT.02 RW.07 Kel. Dalam Bugis Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
54		RT 004 / RW 007 Kel. Bansir Darat Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
55		Jl. Prof M Yamin Gg. Sinar Usaha 1 / Sinar Bersama RT.03/RW.09 Kota Baru Pontianak Selatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Diakomodir
56		RW 06, RW 18, RW 24, RW 11, RW 25, RW 27, RW 30 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	Tidak Diakomodir
57		Wilayah Kelurahan Saigon Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Tidak Diakomodir

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Sosial dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian Sosial 2020- 2024. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut. Arah Kebijakan Nasional. Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita

Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Tujuan Renstra 2024-2026 Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra 2024 - 2026 Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,2 – 4,3
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	100
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	100
3	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	Persen	100

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengklasifikasi sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak adalah:

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menurunnya Kemiskinan	1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial	1.1. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak.
	2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	2.1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya. 2.2. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar.	1.1. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

	3. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana sesuai standar waktu	3.1 Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.	3.1. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.
--	---	---	---

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini dengan mengoptimalkan kewenangan untuk menggalang dukungan stakeholder, pekerja sosial dan instansi vertikal dalam penanganan PMKS, Menggalang lembaga sosial dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi PMKS melalui bimbingan usaha dan bantuan modal, melaksanakan pelatihan bagi PMKS, percepatan pelayanan dan pengaduan masalah data kemiskinan melalui sistem layanan rujukan terpadu.

### 3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Rumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu isu strategis yang berkembang.

Dinas Sosial memiliki tugas untuk memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa target sub kegiatan yang berbeda dengan dokumen Renstra yaitu sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target dalam dokumen Renstra sebanyak 27 Orang sedangkan pada Renja target sebanyak 34 Orang dikarenakan jumlah ASN di Dinas Sosial pada tahun 2025 diperkirakan PNS sebanyak 27 Orang dan PPPK sebanyak 7 Orang.
2. Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target dalam dokumen Renstra sebanyak 9 Unit kendaraan Dinas sedangkan pada Renja sebanyak 12 Unit kendaraan Dinas dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penambahan kendaraan Dinas berupa mobil sebanyak 3 unit termasuk kendaraan dinas yang dimutasikan ke Dinas Sosial Kota Pontianak.
3. Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota target dalam dokumen Renstra sebanyak 20 Orang sedangkan pada Renja 50 Orang dikarenakan adanya tambahan pagu pada sub kegiatan tersebut. Sasaran sub kegiatan tersebut diatas adalah Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan, Tim SLRT dan Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial.
4. Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu target dalam dokumen Renstra sebanyak 5 Orang sedangkan target di Renja sebanyak 50 Orang dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran untuk sub kegiatan tersebut.

Adapun rencana aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan sub kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 592.465.700,00 :

Rencana Aksi :

Melakukan pelatihan untuk Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dibawah bimbingan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Pendamping Rehabilitas Sosial, Tim Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan anggota Tim Siaga Bencana.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 410.600.800,00 :

Rencana Aksi :

- Melakukan pelatihan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak.
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 400.000.000,00:  
Rencana Aksi :
- Membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi pada usulan nama keluarga yang akan diberikan pelatihan.
  - Melakukan pelatihan satpam dan pelatihan menjahit bagi warga kurang mampu yang terdaftar pada DTKS.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran Rp. 475.000.000,00 :  
Rencana Aksi :  
Memberikan makanan sesuai dengan standar gizi minimal kepada penghuni PLAT dan UPRS sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan dianggarkan 1 (satu) tahun.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan anggaran Rp. 258.710.000,00 :  
Rencana Aksi :  
ASN dan Non ASN Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan verifikasi dan asesmen kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis serta Masyarakat tidak mampu yang layak untuk diberikan alat bantu.
- f. Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan anggaran Rp. 320.980.000,00 untuk Belanja Hibah Rumah Rahayu.
- g. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 450.000.000,00. Sub Kegiatan ini mengakomodir Belanja Bantuan Sosial :  
Rencana Aksi :
- Membentuk tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan Camat dan Lurah di lingkungan Kota Pontianak.
  - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan SDM PKH, Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat dan Puskesmas dengan melakukan verifikasi dan validasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Penerima PKH, dan Penerima Bansos BPNT.
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp. 300.000.000,00 :  
Rencana Aksi :

Menugaskan Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Puskesmas untuk melakukan pendataan kepada keluarga calon penerima Bantuan Ekonomi Masyarakat agar tepat sasaran.

Rencana aksi pada sub kegiatan belanja prioritas lainnya digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1  
Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu  
Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>						
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
1	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Melakukan sinkronisasi koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dengan pasar ritel atau swalayan cakupan daerah Kota Pontianak	Rp20.000.000	20 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Melakukan pelatihan untuk Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dibawah bimbingan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Pendamping Rehabilitas Sosial, Tim Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan anggota Tim Siaga Bencana	Rp592.465.700	50 Orang	Kota Pontianak	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Melakukan pelatihan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp410.600.800	42 Orang	Kota Pontianak	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi pada usulan nama keluarga yang akan diberikan pelatihan	Rp400.000.000	27 Keluarga	Kota Pontianak
		2	Melakukan pelatihan satpam dan pelatihan menjahit bagi warga kurang mampu yang terdaftar pada DTKS			
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan Daerah Kota Pontianak	Rp120.000.000	7 Lembaga	Kota Pontianak	
6	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Melakukan kegiatan sosialisasi peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) cakupan daerah Kota Pontianak	Rp50.000.000	20 Sertifikat	Kota Pontianak	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>						
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Melakukan fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Rp2.480.000	5 Orang	Kota Pontianak	
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
1	Penyediaan Permakanan	Memberikan makanan sesuai dengan standar gizi minimal kepada penghuni PLAT dan UPRS sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan dianggarkan 1 (satu) tahun	Rp475.000.000	7795 Orang	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Sandang	Memberikan pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kepada penghuni PLAT dan UPRS	Rp120.960.200	300 Orang	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Alat Bantu	ASN dan Non ASN Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan verifikasi dan asesmen kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis serta Masyarakat tidak mampu yang layak untuk diberikan alat bantu	Rp258.710.000	50 Orang	Kota Pontianak	
4	Pemberian Reunifikasi Keluarga	Melakukan pemulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani kepada keluarga	Rp4.980.000	40 Orang	Kota Pontianak	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp20.412.800	50 Orang	Kota Pontianak	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Melaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp48.575.200	100 Orang	Kota Pontianak	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak cakupan daerah Kota Pontianak	Rp4.980.000	40 Orang	Kota Pontianak	
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Memberikan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar cakupan daerah Kota Pontianak	Rp14.980.000	60 Orang	Kota Pontianak	
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Memberikan layanan data dan pengaduan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Rp61.580.000	200 Orang	Kota Pontianak	

10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Melakukan tindakan lanjut kepada mayat terlantar berdasarkan laporan masyarakat	Rp31.980.000	10 Orang	Kota Pontianak	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Melakukan pencarian keluarga orang terlantar berdasarkan laporan	Rp3.980.000	40 Orang	Kota Pontianak	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Melakukan rujukan kepada orang terlantar atau ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat atau ke lembaga pengampu	Rp4.980.000	80 Orang	Kota Pontianak	
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>						
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Melaksanakan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp37.175.200	300 Orang	Kota Pontianak	
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Melaksanakan kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp320.980.000	50 Orang	Kota Pontianak	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>						
<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Membentuk tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan Camat dan Lurah di lingkungan Kota Pontianak 2 Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan SDM PKH, Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat dan Puskesmas dengan melakukan verifikasi dan validasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Penerima PKH, dan Penerima Bansos BPNT	Rp450.000.000	40000 Orang	Kota Pontianak	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pengelolaan data dari hasil verifikasi dan validasi di lapangan bersama dengan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp34.980.000	20000 Keluarga	Kota Pontianak	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Melakukan fasilitasi pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp2.850.000.000	10000 Keluarga	Kota Pontianak	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Menugaskan Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Puskesmas untuk melakukan pendataan kepada keluarga calon penerima Bantuan Ekonomi Masyarakat agar tepat sasaran.	Rp300.000.000	100 Orang	Kota Pontianak	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						
<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						
1	Penyediaan Makanan	Melakukan fasilitasi pemberian makanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Rp142.090.000	350 Orang	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Sandang	Melakukan fasilitasi pemberian pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Rp159.225.000	200 Orang	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Melakukan fasilitasi pemberian tempat pengungsian berupa terpal kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Rp20.000.000	100 Unit	Kota Pontianak	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Melakukan penanganan khusus bagi kelompok lanjut usia, kelompok ibu melahirkan dan menyusui, kelompok balita dan anak-anak, serta kelompok disabilitas korban bencana alam dan bencana sosial	Rp31.135.000	40 Orang	Kota Pontianak	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Melakukan pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana alam dan bencana sosial	Rp30.000.000	12 Orang	Kota Pontianak	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>						
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp28.230.600	50 Orang	Kota Pontianak	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Menyusun rancangan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 Melakukan rapat internal terkait perencanaan program dan kegiatan per bidang 3 Melakukan koordinasi dengan Bappeda	Rp18.500.000	8 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melakukan Koordinasi untuk Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp6.000.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Melakukan Koordinasi untuk Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp7.500.000	2 Dokumen	Kota Pontianak	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan Koordinasi untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp15.000.000	8 Laporan	Kota Pontianak	

5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan rapat Evaluasi Kinerja internal	Rp13.394.400	5 Laporan	Kota Pontianak	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Melakukan input gaji dan tunjangan pada aplikasi SIPD-RI	Rp5.125.421.000	34 Orang	Kota Pontianak	
		2 Melakukan transfer gaji dan tunjangan kepada ASN di Dinas Sosial Kota Pontianak				
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp275.400.000	12 Dokumen	Kota Pontianak	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Rp14.920.000	18 Laporan	Kota Pontianak	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Melakukan rapat internal terkait kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah	Rp1.145.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
		2 Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah				
		3 Menginput perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ke aplikasi SIMBADA				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Melakukan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp42.620.000	70 Paket	Kota Pontianak	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Menugaskan ASN untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp20.000.000	5 Orang	Kota Pontianak	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp18.000.000	12 Paket	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Rp90.011.500	12 Paket	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp70.000.000	12 Paket	Kota Pontianak	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.500.000	12 Dokumen	Kota Pontianak	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi tamu yang hadir ke Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp5.000.000	12 Laporan	Kota Pontianak	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kota Pontianak	Rp150.000.000	34 Laporan	Kota Pontianak	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan website Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp52.010.000	12 Dokumen	Kota Pontianak	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan pengadaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin lainnya	Rp250.000.000	13 Unit	Kota Pontianak	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Membuat laporan terkait administrasi penyediaan jasa surat menyurat	Rp12.000.000	12 Laporan	Kota Pontianak	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyusun administrasi terkait jasa komunikasi (jaringan internet), Sumber Daya Air dan listrik	Rp245.045.078	12 Laporan	Kota Pontianak	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melakukan perawatan pada peralatan dan perlengkapan kantor	Rp55.000.000	22 Laporan	Kota Pontianak	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.021.099.200	12 Laporan	Kota Pontianak	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas	Rp227.400.000	12 Unit	Kota Pontianak	
		2 Membayar pajak kendaraan dinas				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp111.010.000	100 Unit	Kota Pontianak	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan rehabilitasi bangunan gedung yang menjadi aset Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp597.014.322	1 Unit	Kota Pontianak	

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan maka pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan kami tuangkan dalam tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituang kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 yang terdiri **dari 6 (enam) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan**. Alokasi Program, kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung sasaran pada RPD yang juga merupakan Tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan. Adapun Pagu Indikatif Dinas Sosial Tahun 2025 sebesar Rp. 15.496.471.000,00 dengan sumber pendanaan untuk belanja Pegawai bersumber dari DAU dan PAD, untuk Belanja Barang bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Sosial bersumber dari DAU-dana bagi hasil. Adapun Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil DAU- Dana Bagi Hasil</b>
1.1	<b>Pengumpulan undangan dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengembangan PPKS</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabipaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1.2.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
2	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
2.1	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>% Tingkat Penanganan Bagi Warga Negara Imigran Tindak Kekerasan</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
2.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Psykotik Terlantar yang ditangani dan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DAU- Dana Bagi Hasil
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
3.1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial</b>	<b>Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
3.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Koita	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.8	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
3.1.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar panti</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
3.2.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.2.2	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
4.1	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
5.1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
5.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
5.1.4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
5.2.1	Koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesektarian</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.1	<b>Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarian</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	DAU- Dana Bagi Hasil
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DAU- Dana Bagi Hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
6.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DAU, PAD
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
<b>6.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.4.1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan	DAU- Dana Bagi Hasil
<b>6.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.5.2	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
6.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DAU- Dana Bagi Hasil
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	DAU- Dana Bagi Hasil
6.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	DAU- Dana Bagi Hasil
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU- Dana Bagi Hasil
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DAU- Dana Bagi Hasil
6.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DAU- Dana Bagi Hasil</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DAU- Dana Bagi Hasil
6.8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DAU- Dana Bagi Hasil
6.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DAU- Dana Bagi Hasil

3. Proyek Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah.

Proyek Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 terdapat pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target 10.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dianggarkan sebesar Rp. 2.850.000.000,00. Rencana aksi dalam pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. Membentuk tim verifikasi dan validasi data usulan yang dilaporkan untuk disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data usulan yang dilaporkan apakah layak untuk didaftarkan pada DTKS jika nama warga yang dilaporkan belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial.
- c. Bekerjasama dengan tim SDM PKH dalam penyaluran Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel III.2  
Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Pengampu  
Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah	2.850.000.000,00	10.000 Keluarga	Kota Pontianak	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak**

Dengan diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan disusun pada Renja Tahun 2025 Renja Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari 6 (enam) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS SOSIALKOTA PONTIANAK**  
**TAHUN 2025**

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					DINAS SOSIAL						15.490.212.000,00					13.764.357.000,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.490.212.000,00					13.764.357.000,00				
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						15.490.212.000,00					13.764.357.000,00				
1	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan	95 %				95 %	8.639.731.500,00				95 %	7.572.025.200,00			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%				100 %	75.394.400,00			Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	60.394.400,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen				8 Dokumen	33.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	8 Dokumen	18.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen				1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen				2 Dokumen	7.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	2 Dokumen	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan				8 Laporan	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	8 Laporan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan				5 Laporan	13.394.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	5 Laporan	13.394.400,00	DINAS SOSIAL

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%			100 %	5.594.482.000			-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	4.783.627.000,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan			34 Orang/bulan	5.304.162.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	27 Orang/bulan	4.493.307.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	275.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Dokumen	275.400.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	14.920.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	18 Laporan	14.920.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%			100 %	1.145.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	2.500.000,00	
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.145.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100 %	62.620.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	87.620.000,00	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket			70 Paket	42.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	70 Paket	42.620.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			5 Orang	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	5 Orang	45.000.000,00	DINAS SOSIAL

1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 %	387.521.500,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	638.226.050,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket				12 Paket	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	29.839.950,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket				12 Paket	90.011.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	120.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket				12 Paket	70.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	80.886.100,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen				12 Dokumen	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Dokumen	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan				34 Laporan	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	40 Laporan	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen				12 Dokumen	52.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	250.000.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	300.000.000,00	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit				13 Unit	250.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	13 Unit	300.000.000,00	DINAS SOSIAL

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	1.354.403.278,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	1.329.527.750,00		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	266.304.078,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	276.428.550,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			2 Laporan	55.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	1.021.099.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	1.021.099.200,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	914.165.322,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100%	370.130.000,00		
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			12 Unit	227.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	9 Unit	159.120.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			100 Unit	111.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100 Unit	111.010.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	575.755.322,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %			100 %	1.593.066.500,00							100 %	1.562.465.700,00	

	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	100%			100 %	20.000.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	20.000.000,00	
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	60 Dokumen			20 Dokumen	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	20 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%			100 %	1.573.066.500,00			-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	1.542.465.700,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 (PSM) Orang			50 Orang	592.465.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	20 (PSM) Orang	492.465.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	126 Orang			42 Orang	410.600.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	42 Orang	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Keluarga			27 Keluarga	400.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	27 Keluarga	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Lembaga			7 Lembaga	120.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	7 Lembaga	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Sertifikat			20 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	20 Sertifikat	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %			100 %	2.480.000,00						100 %	10.000.000,00	

1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	100%			100 %	2.480.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	10.000.000,00		
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal															
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			5 Orang	2.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	5 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %			100 %	1.209.273.400,00							100 %	1.185.250.400,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%			100 %	1.051.118.200,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	1.027.095.200,00		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	23385 Orang			7795 Orang	475.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	7795 Orang	550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang															
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang			300 Orang	120.960.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	300 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			50 Orang	258.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	5 Orang	120.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reumifikasi Keluarga															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reumifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			40 Orang	4.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	40 Orang	4.980.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			50 Orang	20.412.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	50 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															



							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang				50 Orang	120.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	50 Orang	120.980.000,00		DINAS SOSIAL	
5	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM	100 %			100 %	3.634.980.000,00							100 %	3.023.935.100,00		
	1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	100%			100 %	3.634.980.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	3.023.935.100,00			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	120000 Orang			40000 Orang	450.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	40000 Orang	450.000.000,00		DINAS SOSIAL		
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga			20000 Keluarga	34.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	20000 Keluarga	34.980.000,00		DINAS SOSIAL		
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30000 Keluarga			10000 Keluarga	2.850.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	10000 Keluarga	2.512.955.100,00		DINAS SOSIAL		
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang			100 Orang	300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100 Orang	26.000.000,00		DINAS SOSIAL		
6	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100 %			100 %	410.680.600,00							100 %	410.680.600,00		
	1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	100%			100 %	382.450.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	382.450.000,00			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																		

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang			350 Orang	142.090.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	350 Orang	142.090.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang			200 Orang	159.225.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	200 Orang	159.225.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																	
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit			100 Unit	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100 Unit	20.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			40 Orang	31.135.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	40 Orang	31.135.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang			12 Orang	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	12 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100%			100 %	28.230.600,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	100%	28.230.600,00				
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			50 Orang	28.230.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat	50 Orang	28.230.600,00	DINAS SOSIAL			
<b>J U M L A H</b>											<b>15.490.212.000,00</b>										<b>13.764.357.000,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu didukung dengan perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas dan tetap sasaran serta didukung oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja yang terlatih.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran sebelumnya, dengan adanya dokumen Renja diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak yang efisien serta tepat sasaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 14 Agustus 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PONTIANAK**



**drg. TRISNAWATI, M.M.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19730610 200012 2 004**